

KONSEP DASAR ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Hendra Mahardika

Email: hendra2000031161@webmail.uad.ac.id
Universitas Ahmad Dahlan

Khusnul Chotimah

Email: khusnul2000031259@webmail.uad.ac.id
Universitas Ahmad Dahlan

Muhammad Dzaki

Email: muhammad2000031179@webmail.uad.ac.id
Universitas Ahmad Dahlan

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang bagaimana analisis dalam dunia pendidikan dan bagaimana cara pengimplemenetasiannya yang sesuai dengan nilai-nilai yang mengarah perubahan pada dunia pendidikan. Analisis kebijakan pendidikan adalah prosedur dengan menggunakan data untuk menghasilkan informasi serta untuk perumusan untuk memecahkan sebuah masalah kependidikan, dan juga sebagai ilmu sosial terapan dirangkai dengan tujuan substansi kebijakan pendidikan dengan tujuan mempermudah mengetahui masalah dalam pendidikan. Maka dari itu pemerintah dan pihak tertentu memperbaiki dan mempertahankan kebijakan yang mengarah pada kemaslahatan bersama dalam pendidikan.

Kata Kunci: Analisis, Kebijakan, Pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu hal yang penting untuk dapat meningkatkan kualitas yang terdapat dalam diri seseorang. Pada sebuah analisis kebijakan ialah penelitian sosial supaya dapat mengetahui substansi dari suatu kebijakan yang akan dapat diketahui secara jelas yang dilakukan secara sistematis. Kebijakan pendidikan merupakan sebuah konsep metode untuk dapat mewujudkan suatu informasi data yang berada dalam sebuah pendidikan sebagai suatu pengaruh seperti alat alternatif yang digunakan

sebagai perumus kebijakan pada saat pengambilan keputusan yang mempunyai sifat diplomatis dalam hal mengatasi masalah pendidikan¹.

Dari banyaknya penjelasan mengenai analisis kebijakan pendidikan menurut para ahli, untuk itu analisis kebijakan pendidikan itu tergantung pada perspektif atau sudut pandang yang diambil. Dari permasalahan diatas, makalah ini akan membahas mengenai konsep dasar analisis kebijakan pendidikan, dimana ada beberapa sub bab pembahasan yang akan dibahas. Sub bab pembahasan yang akan dibahas yaitu mengenai definisi dari analisis kebijakan pendidikan, urgensi, fungsi, karakteristik, dan nilai nilai dalam analisis kebijakan pendidikan².

Ketika kebijakan tidak dijalankan secara baik, maka akan timbul kesenjangan implementasi (Implementation GAP) yang diartikan sebagai perbedaan antara hukum yang tertulis dengan prakteknya di lapangan. Biasanya Implementation GAP ini terlihat dan sering dirasakan pada level bawah. Penyebab adanya implementation gap dapat berasal dari faktor politik, ekonomi, dan sosial budaya. Untuk mengatasi implementation gap dibutuhkan pendekatan yang berfokus pada kualitas kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat³.

KONSEP TEORI

Landasan teori yang pertama, jurnal dari Syafira Masnu'ah, dkk yang berjudul "Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003 (Sisdiknas). Kebijakan pendidikan Islam dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa eksistensi pendidikan Islam dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 secara jelas diimplementasikan sebagai lembaga pendidikan, materi pelajaran, dan nilai-nilai agama Islam. Kebijakan pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan terbagi menjadi pendidikan formal, nonformal, dan informal. Namun dalam pelaksanaannya pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan sering kali mengalami probelmatika baik dari faktor internal maupun eksternal, baik dari hubungan komite sekolah dengan pengurus madrasah, kualitas guru, biaya, jumlah madrasah yang statusnya negeri dan swasta, maupun dari sarana prasana sekolah. Adapun pendidikan Islam sebagai materi tercantum dalam

¹Iwan Heriawan. "Kebijakan Pendidikan Provinsi (SLTA Dan SMK) Dan Analisis Swot Di Kalimantan Timur." *Jurnal Pendas Mahakam* 3. 2 (2018): 99.

²Syafira Masnu'ah. "Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 (SISDIKNAS)." *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 9. 1 (2022): 115-30.

³Sasadara Wahyu Lukitasari. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi," *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan* 4. 2 (2017): 121-134.

kurikulum pada setiap jenjang pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang harus terdapat materi keagamaan⁴.

Konsep teori yang kedua, jurnal dari Amin Maghfuri yang berjudul "Analisis Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Orde Reformasi (1998-2004). Masalah pemerataan, sentralisasi, kurikulum, pendanaan dan lain-lain dirasa masih menjadi persoalan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Itulah sebabnya diperlukannya payung hukum kebijakan untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, dan UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 ini dirasa menjadi payung hukum yang paling lengkap dan merupakan upaya untuk merealisasikan amanat yang ada dalam UUD 1945. Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 ini juga merupakan angin segar bagi keberlangsungan pendidikan Islam di Indonesia. Setidaknya ada tiga hal yang termuat dalam UU Sisdiknas tahun 2003 yang berkaitan dengan pendidikan Islam, yaitu diakuinya kelembagaan pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren, diakuinya pendidikan Islam sebagai mata pelajaran baik di sekolah atau madrasah, dan diakuinya Islam sebagai seperangkat nilai-nilai dalam Sistem Pendidikan Nasional⁵.

METODE

Dalam jurnal ini menggunakan penelitian studi literatur, penelitian studi literatur adalah penelitian yang hanya merujuk ke buku-buku maupun karya ilmiah seseorang. Menurut Creswell, John. W menyatakan bahwa Kajian literatur adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan. Jadi dapat disimpulkan studi literatur adalah penelitian yang mengarah ke buku dan karya tulis seseorang untuk penguat dalam membuat karya tulis itu sendiri⁶.

PEMBAHASAN

Pengertian Analisis Kebijakan Pendidikan

⁴Syafira Masnu'ah, dkk. "Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas)." *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 9. 1 (2022): 128-129.

⁵Amin Maghfuri. "Analisis Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Orde Reformasi (1998-2004)." *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8. 1 (2020): 24-25.

⁶Bakhrudin All Habsy. "Seni Memahami Penelitian Kuliitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi Literatur." *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa* 1. 2 (2017): 90.

Menurut Hanisy analisis kebijakan pendidikan merupakan prosedur untuk menghasilkan informasi kependidikan, dengan menggunakan data sebagai salah satu masukan bagi perumusan beberapa alternatif kebijakan dalam pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah kependidikan. Dari banyaknya pendapat para ahli mengenai analisis kebijakan pendidikan, dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan pendidikan ini merupakan sebuah ilmu sosial terapan sistematis yang dirangkai untuk dapat mengetahui substansi kebijakan pendidikan, supaya masalah dapat diketahui secara jelas supaya dijawab oleh kebijakan dan masalah yang dirasa akan terjadi merupakan akibat penerapan kebijakan⁷.

Analisis kebijakan pendidikan merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pendidikan di menentukan suatu negara, arah dan Pendidikan pedoman dalam penyelenggaraannya tidak dapat lepas dari kebijakan pemerintah atau pihak yang memiliki kewenangan di suatu lembaga. Dengan melakukan analisis kebijakan, kita akan dapat mempelajari dan memahami kebijakan pemerintah atau pihak terkait sebagai pengelola pendidikan secara akurat⁸.

Analisis kebijakan pendidikan juga sebagai ilmu sosial terapan sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi kebijakan pendidikan, agar diketahui secara jelas masalah yang akan dijawab oleh kebijakan dan masalah yang berpeluang timbul sebagai akibat implementasi kebijakan pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu analisis kebijakan dalam bidang pendidikan menjadi suatu yang amat penting dalam era demokrasi termasuk memasuki era revolusi industri 4.0, dalam artian nya pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan tidak dibiarkan melaksanakan tindakan tertentu yang mempengaruhi masyarakat tanpa dipelajari dan dikaji substansi, alasan dan akibatnya bagi masyarakat, disamping penting juga bagi pembuat kebijakan guna memperbaiki, atau mempertahankan kebijakan guna kemaslahatan masyarakat banyak atau kepentingan stakeholders pendidikan itu sendiri⁹.

⁷Abd. Majid. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.

⁸Arwildayanto, dkk. *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Adaktif*. Bandung: CV. Cendekia Press, 2018.

⁹Jumira Warlizasusi dan Sumarto. *Analisis Kebijakan Pendidikan Islam*. Bengkulu: Penerbit Buku Literasiologi, 2022.

Bisa disimpulkan dari berbagai pendapat bahwa analisis kebijakan pendidikan adalah prosedur dengan menggunakan data untuk menghasilkan informasi serta untuk perumusan untuk memecahkan sebuah masalah kependidikan, dan juga sebagai ilmu sosial terapan dirangkai dengan tujuan substansi kebijaka pendidikan dengan tujuan mempermudah mengetahui masalah dalam pendidikan. Maka dari itu pemerintah dan pihak tertentu memperbaiki dan mempertahankan kebijakan yang mengarah kemaslahatan bersama dalam pendidikan.

Urgensi Analisis Kebijakan Pendidikan

Menurut Arwildayanto, dkk, analisis kebijakan pendidikan merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pendidikan di menentukan suatu negara, arah dan Pendidikan pedoman dalam penyelenggaraannya tidak dapat lepas dari kebijakan pemerintah atau pihak yang memiliki kewenangan di suatu lembaga. Dengan melakukan analisis kebijakan, kita akan dapat mempelajari dan memahami kebijakan pemerintah atau pihak terkait sebagai pengelola pendidikan secara akurat. Pendidikan sebagai satu bagian besar dari dimensi kehidupan manusia memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia baik individu maupun kelompok. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau publik yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan perlu dicermati, mengingat dampaknya yang sangat luas bagi kehidupan manusia dalam jangka pendek maupun jangka panjang¹⁰.

Analisis kebijakan pendidikan perlu didasarkan pada suatu prinsip objektif, tidak hanya untuk menyalahkan kebijakan pendidikan oleh pemerintah yang sedang berkuasa, atau pihak lain sebagai penyelenggara pendidikan. Namun juga memberi gambaran yang memungkinkan berupa perbaikan kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah atau penyelenggara pendidikan. Hal ini tentu saja memerlukan suatu pendekatan ilmiah yang objektif dan akurat. Dalam hubungan ini analisis kebijakan pendidikan menjadi penting guna memahami dan memperbaiki kebijakan apabila hasil analisis menunjukkan konsekwensi yang belum sesuai dengan rencana yang diharapkan. Analisis kebijakan pendidikan penting dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, guna membantu menentukan pilihan tepat atas suatu tindakan yang akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat itu sendiri, khususnya dalam aspek pendidikan¹¹.

¹⁰Mohammad Emnis Anwar. "Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia." *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam* 3.1 (2014): 485-486.

¹¹Dedi Lazwardi. "Manajemen Kurikulum sebagai Pengembangan Tujuan Pendidikan." *Al-Idarah:Jurnal Kependidikan Islam* 7.1 (2017): 100.

Fungsi Analisis Kebijakan Pendidikan

Analisis Kebijakan (Pendidikan) merupakan penerapan analisis dalam bidang pendidikan untuk menjelaskan, menilai, dan menghasilkan pemikiran (alternatif solusi) dalam rangka memecahkan masalah publik sebagai bentuk proses pengambilan keputusan bidang pendidikan. Pendekatan dalam analisis kebijakan menggunakan pendekatan deskriptif dan normatif. Pendekatan deskriptif maksudnya untuk menyajikan informasi apa adanya kepada pengambil keputusan agar pengambil keputusan memahami permasalahan yang ada. Sedangkan pendekatan normatif dimaksudkan untuk membantu para pengambil keputusan dalam memberikan gagasan hasil pemikiran agar para pengambil keputusan dapat memecahkan suatu kebijakan. Dalam analisis kebijakan ada dua paradigma metodologi yang sering dipakai, yaitu paradigma kuantitatif dan paradigma kualitatif¹².

Adapun fungsi lain analisis kebijakan pendidikan ada tiga fungsi yaitu:

- 1) Fungsi Alokasi. Dalam kegiatan analisis kebijakan pendidikan, fungsi alokasi merupakan salah satu fungsi yang penting untuk diperankan. Hal ini berkaitan dengan mengalokasikan agenda penelitian, pengembangan, dan analisis kebijakan pendidikan itu sendiri yang berlandaskan kajian terhadap isi-isu kebijakan pendidikan yang tingkatnya lebih makro dan strategis.
- 2) Fungsi inquiri. Apabila semua atau sebagian agenda penelitian dan pengembangan telah terlaksanakan dan mencapai hasilnya maka fungsi inquiri ini dapat dilaksanakan. Topik penelitian dari fungsi ini adalah komponen integral dari isu kebijakan strategis-politis. Kajian kegiatan analisis kebijakan pendidikan dalam fungsi inquiri ini bersifat komprehensif yang bisa berbentuk kajian metodologi atau kajian substansi
- 3) Fungsi komunikasi. Fungsi ini dapat dilakukan apabila analisis kebijakan pendidikan sudah menghasilkan berbagai usulan kebijakan yang realistis. Dalam fungsi komunikasi ada pihak-pihak untuk bisa melaksanakan tugas analisis kebijakan yaitu penyampaian alternatif atau gagasan kebijakan. Pihak terkait misalnya pembuat keputusan, perencana, pengelola, peneliti, dan masyarakat luas sebagai konsumen pendidikan¹³.

Karakteristik Analisis Kebijakan Pendidikan

¹²Mujianto Solichin. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokasi." *Religi: Jurnal Studi Islam* 6.2 (2015): 153.

¹³Anesti Rohma, dkk. "Konsep Dasar Analisis Kebijakan Pendidikan." *Shautut Tarbiyah* 10.3 (2018): 83-101.

Menganalisis kebijakan pendidikan yang merupakan suatu proses, jalan, ataupun kegiatan sintesis yang bersumber dari berbagai macam sumber informasi tentang pelayanan dalam pendidikan dan merupakan suatu informasi yang secara langsung menjadi sumber utama dalam sebuah kajian analisis kebijakan sekaligus merupakan keluaran atau output serta dapat berupa suatu nasehat petunjuk teknis standar operasional prosedural (SOP). Karakteristik analisis kebijakan pendidikan berupa suatu bahan dasar, alur, urutan dan target untuk mengambil keputusan yang bersangkutan dengan pendidikan kemudian pengguna dari analisis ini merupakan para pengambil keputusan serta kelompok yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Analisis kebijakan pendidikan ini harus Memiliki konsep operasional dan juga tujuan yang jelas untuk memperjelas skema pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan dan juga harus dibuat oleh pihak yang berwenang¹⁴.

Adapun kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang membedakannya dengan kebijakan lainnya. Adapun karakteristik kebijakan pendidikan yaitu:

- 1) Memiliki tujuan pendidikan
Sebuah kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan khusus yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Tujuan pendidikan yang disusun harus lebih terarah dan jelas serta memberikan gambaran mengenai kontribusi terhadap dunia pendidikan
- 2) Terpenuhinya aspek legal dan formal
Sebelum kebijakan pendidikan di belakukan maka perlu dipenuhi prasyarat-prasyarat yang agar kebijakan tersebut berlaku sah dan diakui. Oleh sebab itu perlunya kebijakan tersebut di sah kan melalui persyaratan konstitusional berdasarkan hirarki konstitusi yang berlaku sehingga dilahirkan legimasi kebijakan pendidikan
- 3) Memiliki konsep operasional
Kebijakan pendidikan merupakan seperangkat panduan yang bersofat umum. Maka sebuah kebijakan pendidikan harus memiliki manfaat operasional yang dapat diterapkan
- 4) Konsep operasional
ini harus dimiliki agar pencapaian tujuan dapat di ukur secara jelas. Dibuat oleh yang berwenang Kebijakan pendidikan dirumuskan dan dibuat oleh par ahli yang memiliki hak dan wewnang dalam pembuatan kebijakan. Hal

¹⁴Irwan Ghazali, dkk. "Analisis Kebijakan Pendiidkan." *At-Tajdid : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5. 2 (2022): 69-70.

ini bertujuan agar tidak timbulnya permasalahan baru yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.

- 5) Dapat dievaluasi
Kebijakan pendidikan harus dapat dievaluasi. Suatu kebijakan apabila baik maka kebijakan tersebut dapat dikembangkan. Apabila kebijakan tersebut terdapat kesalahan maka harus dapat diperbaiki
- 6) Memiliki sistematika
Kebijakan pendidikan terdapat sistematika yang berhubungan dengan seluruh aspek yang terdapat didalamnya. Sistematika harus memperhatikan efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan. Kebijakan juga harus bersifat tidak pragmatis dan deskriminatif. Kebijakan juga tidak boleh bersifat rapuh struktur. Hal ini agar kebijakan yang dilahirkan tidak mengalami kecacatan hukum baik secara internal maupun eksternal¹⁵.

Nilai- Nilai Analisis Kebijakan Pendidikan

Dalam menganalisis kebijakan pendidikan, terdapat beberapa nilai yang penting untuk dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa nilai-nilai yang umumnya diperhatikan dalam analisis kebijakan pendidikan:

- 1) Aksesibilitas: Kebijakan pendidikan harus mengutamakan aksesibilitas yang adil bagi semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau kecacatan. Setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
- 2) Kesetaraan: Nilai kesetaraan menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik. Kebijakan pendidikan harus mengatasi kesenjangan dan diskriminasi yang mungkin terjadi dalam sistem pendidikan.
- 3) Kualitas: Fokus pada kualitas pendidikan adalah nilai penting dalam analisis kebijakan. Kebijakan pendidikan harus mendorong peningkatan kualitas pendidikan, termasuk kualitas guru, kurikulum, dan fasilitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang baik akan memberikan hasil yang lebih baik bagi peserta didik.
- 4) Keterlibatan: Penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pendidikan, termasuk guru, siswa, orang tua, masyarakat, dan pakar pendidikan. Keterlibatan mereka dapat memperkuat kebijakan dan menghasilkan implementasi yang lebih efektif.

¹⁵Hardianto Rahman. "Miskonsepsi Pendidikan Gratis." *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan* 6. 1 (2020): 36-45.

- 5) Keberlanjutan: Kebijakan pendidikan harus dirancang dengan mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang. Hal ini mencakup aspek keuangan, kebijakan yang berkelanjutan dari waktu ke waktu, serta penyesuaian dan inovasi untuk menghadapi perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan dunia pendidikan.
- 6) Relevansi: Kebijakan pendidikan harus relevan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Hal ini mencakup pengembangan kurikulum yang relevan dengan dunia kerja, teknologi, dan perubahan sosial yang terjadi.
- 7) Pemerataan: Penting untuk memastikan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah dan komunitas. Tidak boleh ada kesenjangan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah yang kaya dan miskin.
- 8) Inklusi: Nilai inklusi menekankan pentingnya mencakup semua individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau berkebutuhan khusus. Kebijakan pendidikan harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk belajar.
- 9) Kebebasan akademik: Penting untuk menjaga kebebasan akademik dalam sistem pendidikan. Guru dan siswa harus memiliki kebebasan untuk menyampaikan, menerima, dan mengeksplorasi berbagai gagasan dan pendekatan dalam konteks pembelajaran.
Nilai-nilai ini menjadi pedoman penting dalam analisis kebijakan pendidikan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan.¹⁶

KESIMPULAN

Bisa disimpulkan dari berbagai pendapat bahwa analisis kebijakan pendidikan adalah prosedur dengan menggunakan data untuk menghasilkan informasi serta untuk perumusan untuk memecahkan sebuah masalah kependidikan, dan juga sebagai ilmu sosial terapan dirangkai dengan tujuan substansi kebijakan pendidikan dengan tujuan mempermudah mengetahui masalah dalam pendidikan. Maka dari itu pemerintah dan pihak tertentu memperbaiki dan mempertahankan kebijakan yang mengarah kemaslahatan bersama dalam pendidikan.

Dalam dunia pendidikan kita tidak bisa hanya menyalahkan kebijakan dari pemerintah, jika dalam kebijakan pemerintah yang dibuat memiliki suatu kesalahan sebaiknya kita sebagai masyarakat yang bertanggung jawab atas

¹⁶Rahmat. *Pendidikan Agama Islam*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.

kependidikan ini ikut andil dalam membantu. Ikut andil ini kita bisa melakukan analisis kebijakan, kita akan dapat mempelajari dan memahami kebijakan pemerintah atau pihak terkait sebagai pengelola pendidikan secara akurat. Karena menganalisis kebijakan pendidikan merupakan suatu proses, jalan, ataupun kegiatan yang bersumber dari berbagai macam sumber informasi tentang pelayanan dalam pendidikan. Ada satu hal lagi yang paling penting yaitu dalam dunia pendidikan kita mempunyai berhak untuk menganalisis kebijakan pemerintah yang telah dibuat guna untuk memajukan kualitas pendidikan di negara kita ini, akan tetapi yang harus dilakukan sebelum menganalisis adalah kita memperhatikan nilai-nilai yang penting untuk dipertimbangkan. Untuk nilai-nilainya adalah aksesibilitas, kesetaraan, kualitas, keterlibatan, keberlanjutan, relevansi, pemerataan, inklusi dan kebebasan akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Iwan Heriawan. "Kebijakan Pendidikan Provinsi (SLTA Dan SMK) dan Analisis Swot Di Kalimantan Timur." *Jurnal Pendas Mahakam* 3. 2 (2018): 99.
- Syafira Masnu'ah. "Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 (SISDIKNAS)." *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 9. 1 (2022): 115-30.
- Sasudara Wahyu Lukitasari. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi," *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan* 4. 2 (2017): 121-134.
- Syafira Masnu'ah, dkk. "Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas)." *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 9. 1 (2022): 128-129.
- Amin Maghfuri. "Analisis Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Orde Reformasi (1998-2004)." *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8. 1 (2020): 24-25
- Bakhrudin Al Habsy. "Seni Memahami Penelitian Kuliitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling: Studi Literatur." *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa* 1. 2 (2017): 90.
- Abd. Majid. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Arwildayanto, dkk. *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Adaktif*. Bandung: CV. Cendekia Press, 2018.
- Jumira Warlizasusi dan Sumarto. *Analisis Kebijakan Pendidikan Islam*. Bengkulu: Penerbit Buku Literasiologi, 2022.
- Mohammad Emnis Anwar. "Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia." *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam* 3.1 (2014): 485-486.

- Dedi Lazwardi. "Manajemen Kurikulum sebagai Pengembangan Tujuan Pendidikan." *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam* 7.1 (2017): 100.
- Mujiyanto Solichin. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokasi." *Religi: Jurnal Studi Islam* 6.2 (2015): 153.
- Anesti Rohma, dkk. "Konsep Dasar Analisis Kebijakan Pendidikan." *Shautut Tarbiyah* 10.3 (2018): 83–101.
- Irwan Ghazali, dkk. "Analisis Kebijakan Pendidikan." *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5. 2 (2022): 69-70.
- Hardianto Rahman. "Miskonsepsi Pendidikan Gratis." *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan* 6. 1 (2020): 36-45.
- Rahmat. *Pendidikan Agama Islam*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.